

yonaki press x sarsetarian records

Mei 2026

Dwifungsi tidak kembali: Ia hanya tidak pernah pergi

TIGA ESAI PENDEK ANTI MILITERISME
EDISI KHUSUS KONTRA KOMANDO TOUR 2026





DAN SEHARUSNYA TIAP INDIVIDU DAN SEL TIDAK MEMBUTUHKAN PERIZINAN UNTUK MELAKUKAN AKSI LANGSUNG. OBROLKAN DAN DISKUSIKAN PADA SEL MASING-MASING

23 Maret 2025

INDONESIA TIDAK GELAP, IA HANYA TAK PERNAH TERANG

Dwifungsi TNI tidak kembali. Ia tidak pernah pergi.

Kehebohan atas pengesahan UU TNI belakangan ini adalah kehebohan yang salah alamat—bukan karena isu tersebut tidak penting, melainkan karena sebagian besar orang bereaksi seolah ini adalah sesuatu yang baru. Padahal 2.569 tentara aktif sudah lama menduduki jabatan sipil sebelum UU ini ada. TNI sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah—termasuk Jawa Barat di bawah Dedi Mulyadi—untuk urusan sampah, jalan, hingga kebencanaan. Seperti yang dikatakan Karlina Supeli: semua sudah dijalankan lebih dulu, legalitas menyusul kemudian. UU TNI ini hanya membubuhkan tanda tangan pada fakta yang sudah lama berjalan.

Jalan menuju sini dirintis oleh Jokowi, bukan Prabowo. Prabowo adalah boneka—dipilih bukan karena visi, melainkan karena "goyang gemoy"—sementara Jokowi adalah

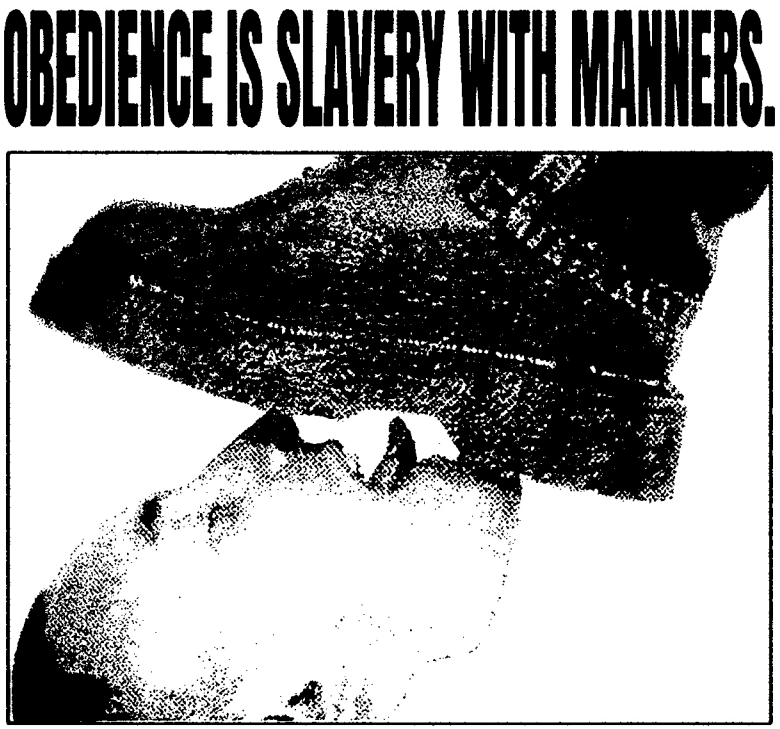


arsiteknya. Sejak awal ia berkuasa, ia melibatkan puluhan purnawirawan dalam tim kampanye dan kemudian memberi mereka jabatan strategis. Saat pandemi, militer mengambil peran yang seharusnya menjadi domain medis. Saat Food Estate dibuka, militer yang memuluskan pembukaan lahan—dan tak ada yang menanyakan ke mana perginya kayu-kayu hasil penebangan hutan itu. Semua ini terjadi di bawah sorak-sorai supremasi sipil, di bawah narasi Pakde yang blusukan dan merakyat. Jokowi hanya butuh dua periode untuk membangun apa yang Suharto butuhkan 32 tahun. Ini bukan kebetulan; ini adalah strategi.

Yang memperparah keadaan adalah kebutaan kolektif para pendukungnya—termasuk mereka yang mengaku Kiri. Mereka yang dulu paling lantang berteriak "Cabut Dwifungsi ABRI" bungkam, atau lebih buruk lagi, ikut masuk ke dalam kabinet. PRD yang dulu heroik kini berkata, "kami tidak dalam posisi strategis untuk berpendapat"—sebuah kalimat yang hanya mungkin lahir dari mulut orang yang sudah punya kursi untuk dilindungi. Sementara para intelektual yang semestinya kritis memilih untuk meminta kita melupakan masa lalu Prabowo dan menilainya hanya dari kinerjanya hari ini—logika yang sama absurdnya dengan menitipkan anak ke sekolah yang kepala sekolahnya adalah mantan napi pedofilia, lalu berkata, "yang penting ia bisa menjalankan tugasnya sekarang."

Maka wajar bila KSAD Maruli Simanjuntak menyebut para pengkritik UU TNI sebagai kampungan. Dalam satu hal, ia tidak sepenuhnya salah: Indonesia memang tidak pernah benar-benar keluar dari kendali militer. Yang ada hanyalah ilusi sebentar bahwa kita pernah bebas. Dan ilusi itu dengan sabar dipelihara oleh mereka yang berkepentingan—melalui doublespeak, melalui wajah-wajah sipil yang ramah, dan melalui amnesia kolektif yang kita rawat sendiri dengan penuh keikhlasan.

Indonesia tidak gelap tiba-tiba. Ia memang tidak pernah terang.



kalkulasi kekuasaan—dan ketika mereka mempertanyakannya, jawabannya selalu seragam: kirim tentara.

Tapi siapa yang mau repot-repot mempelajari itu semua, ketika ada Denny Siregar yang siap menuding ini-itu dengan lantang tanpa sekali pun mengajak orang berpikir tentang konteks? Para fasis tidak selalu berbaris dengan seragam cokelat dan lengan terangkat. Kadang mereka berbicara di media sosial, mendapat ribuan tanda suka, dan merasa sedang membela kebenaran. Fasisme bukan tentang niat jahat—ia tentang keengganan berpikir, tentang nilai-nilai yang tidak boleh dipertanyakan, tentang kenyamanan yang dijaga dengan cara tidak mau terusik.

NKRI harga mati. Kalimat itu bukan sekadar pernyataan patriotisme. Ia adalah ancaman: pertanyakan, dan kamu mati. Strukturnya persis sama dengan logika yang membuat bangsa Belanda mengkampanyekan perlawanan terhadap invasi Jerman ke negeri mereka, sambil marah ketika penduduk Hindia Belanda menuntut hal yang sama—kebebasan dari kekuasaan asing. Kita mengutuk yang pertama sebagai pendudukan. Kita menyebut yang kedua sebagai separatisme.

Kita telah bertransformasi menjadi persis seperti mereka yang pernah kita kutuk. Dan seperti orang-orang Jerman biasa di bawah Nazi, kita melakukannya sambil merasa sedang berbuat benar.

2 Agustus 2022

SUMSUM YANG KUHISAP: 1984 — PANDUAN MEMBANGUN NEGARA TOTALITARIAN

George Orwell mungkin tidak meramalkan masa depan. Kemungkinan lain yang lebih menggelisahkan adalah bahwa pemerintah-pemerintah dunialah yang terinspirasi olehnya.
1984 bukan sekadar novel tentang Uni Soviet—ia adalah anatomi kontrol. Partai berkuasa di Oceania berdiri di atas satu prinsip sederhana: ignorance is strength. Selama rakyat tidak tahu, tidak mau tahu, dan tidak diizinkan tahu, kekuasaan tetap aman. Untuk itu dibangunlah Ministry of Truth yang membentuk persepsi publik, thoughtpolice yang melacak mereka yang berpikir berbeda, dan mekanisme vaporization yang membuat para pembangkang lenyap tanpa jejak. Sistemnya tidak perlu brutal setiap saat—ia hanya perlu konsisten, dan perlu terlihat baik.

Sekarang tutup bukunya dan lihat sekeliling!

Di Indonesia, anggota Tim Mawar—kelompok yang pernah disidang atas penghilangan paksa aktivis mahasiswa anti-Orde Baru, vaporization dalam bahasa Orwell—kini menduduki jabatan Pangdam Jaya dan pimpinan badan penanggulangan terorisme. Jabatan terakhir itu khususnya menarik: mereka yang dulu bertugas melacak dan menghilangkan para pembangkang, kini secara resmi bertugas melacak ancaman terhadap negara. Thoughtpolice dengan surat keputusan resmi. Sementara Kemenkominfo, dengan kewenangannya memblokir platform dan meretas percakapan pribadi secara legal, berfungsi persis sebagai Ministry of Truth—bukan karena dipimpin orang-orang tua yang gagap teknologi, seperti yang ramai dikeluhkan, melainkan karena tujuan substansialnya adalah merebut kembali kendali penuh atas ruang informasi.

Yang membuat sistem ini bekerja dengan elegan adalah bahwa semua dilakukan secara legal dan terlihat bertujuan baik. UU ITE dengan pasal karetnya, RKUHP yang menunggu pengesahan, aturan PSE yang melegalkan penyadapan percakapan pribadi—semuanya dikemas sebagai perlindungan terhadap rakyat dari hoaks, terorisme, dan kejahatan siber. Namun perhatikan bagaimana aturan-aturan itu bekerja dalam praktik: pendengung pemerintah yang terbukti menyebarkan hoaks tidak pernah dikenai UU ITE; aturan PSE tidak berlaku bagi vendor pemerintah; UU Cipta Kerja yang dinyatakan tidak konstitusional tetap berjalan tanpa konsekuensi apapun bagi pelakunya. Aturan netral, katanya.

Perbedaan dengan Orwell hanya satu: di Oceania, kontrol dijalankan melalui televisi dan media massa yang sepenuhnya di tangan partai. Di Indonesia 2022, media massa tidak lagi cukup efektif—publik bergerak di media sosial. Maka digunakanlah puluhan ribu pendengung berbayar, dibiayai oleh pajak rakyat, untuk menggolkan narasi pemerintah di ruang-ruang yang seharusnya menjadi ruang publik bebas. Tujuannya tetap sama: ignorance is strength.
Jokowi beserta seluruh jajaran kabinetnya memang membangun sesuatu yang luar biasa—seperangkatinfrastruktur hukum dan kelembagaan yang sedemikian lengkap, terstruktur, dan metodis, sehingga siapapun penggantinya kelak akan mewarisi mesin kekuasaan yang sudah siap pakai untuk tujuan apapun.

Selamat datang di 1984.

25 Agustus 2019

TENTANG MENJADI MANUSIA INDONESIA: TENTANG FASISME

Partai Nazi tidak berkuasa melalui kudeta. Mereka dipilih secara demokratis oleh mayoritas bangsa Jerman—oleh orang-orang biasa yang merasa sedang melakukan hal yang benar. Hanya butuh enam tahun untuk mengubah masyarakat multiras dan multikultur menjadi masyarakat yang menganggap normal penangkapan dan pembunuhan tetangga sendiri. Mereka tidak pernah mempertanyakan kebenaran yang mereka pegang. Mereka tidak perlu—semuanya terasa normal.

Kita tidak jauh berbeda.

Ketika kerusuhan meletus di Papua Barat—berawal dari penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dengan gaya penggerebekan markas teroris, disertai makian-makian rasis dari aparat—reaksi dari lingkaran sosialku lebih banyak berisi tuntutan pengiriman militer daripada pertanyaan tentang apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Termasuk dari kawan yang selama ini kukenal santun, moderat, dan berpikiran terbuka. Kerusuhan itu tidak muncul dari kekosongan. Ia adalah akumulasi dari sekian puluh tahun pergolakan yang tidak pernah diselesaikan—hanya dibungkam dengan mengirim lebih banyak senjata. Sebuah ejekan rasis adalah pemicunya, bukan penyebabnya.

Namun untuk memahami hal itu, seseorang harus bersedia melihat sejarah "Pepera"—proses yang mengantarkan Papua Barat ke pangkuan Indonesia dengan cara yang, kalau diperiksa dengan jujur, sangat bermasalah. Mereka yang terlibat dalam tarik-menarik kepentingan kala itu tidak pernah benar-benar memperhitungkan bahwa tanah yang diperebutkan ada penghuninya. Persis seperti yang terjadi pada bangsa Indian, pada penduduk Afrika di era perbudakan, pada aborigin Australia, ataupun bangsa Palestina. Penduduk asli selalu menjadi variabel yang diabaikan dalam